

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dekade akhir ini semakin marak kejadian-kejadian tidak baik terkait lingkungan hidup yang sebenarnya akibat ulah manusia itu sendiri, kejadian yang cukup viral terakhir misalnya banjir rob di daerah Semarang Utara mungkin ada di antara kita mengatakan ini tidak bisa hanya daerah tertentu apalagi kecil yang bertindak tetapi seluruh daerah di muka bumi yang dihuni oleh manusia karena air laut saling terhubung. Jawabannya, kalau daerah yang terkecil saja tidak memiliki kesadaran akan hal itu maka sulit untuk menjadi meluas dampaknya, bukankah ada perkataan hal yang besar dimulai dari yang kecil? Penyusun berasumsi hal ini bisa sedikit atau bahkan besar terbantu jika ada kesadaran yang kuat dari partai politik untuk turut serta lewat kader di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), lewat calon yang akan diusungnya, atau lewat kader-kadernya yang tidak di legislatif maupun eksekutif untuk lebih peka terhadap lingkungan hidup yang harapannya akan lahir kebijakan yang menyayangi lingkungan hidup tanpa harus ditekan, didemo, diboikot, dan lain sebagainya oleh masyarakat terdampak atau oleh masyarakat yang peduli.

Kita mengetahui juga partai politik adalah salah satu pilar penting demokrasi, sampai ada yang mengatakan arah suatu negara “ditentukan” oleh partai politiknya, bahkan ada yang lebih ekstrim lagi yang menganggap ketua partai politiknya lah yang menentukan. Belum lagi perkataan yang datang dari ilmuwan-

ilmuwan politik, yang tentu apa yang disampaikannya buah dari penelitian yang dilakukan seperti, James Bryce (1888) tidak ada negara merdeka tanpa partai, Schattschneider (1942) partai politik membuahakan demokrasi dan demokrasi mutakhir tidak terbayangkan kecuali dalam bentuk partai, Giovanni Sartori (1976) partai adalah penopang perantara utama di antara masyarakat dan pemerintah, Clinton Rossiter (1960) demokrasi tidak ada tanpa politik, dan hilang politik tanpa partai, Hans Dieter dan lainnya (2000) dalam teori demokrasi mutakhir partai politik dianggap sarana kelembagaan yang utama guna memperantarai hubungan masyarakat pemerintah, partai dikatakan memainkan peranan holistik, sebelum dan sesudah pemilu.

Roy C. Macridis dalam Amal dan Ichlasul (1996) mengatakan andil partai politik tidak tergantikan institusi atau lembaga apapun, bahkan oleh peranan-peranan *civil society* ataupun kumpulan-kumpulan lain yang mengklaim dari kepentingan publik, partai politik jadi penyambung yang menghubungkan elemen-elemen pemerintah dengan kumpulan-kumpulan masyarakat sipil dan rakyat umumnya, partai politik mengolah perbedaan ideologis dan kepentingan dalam masyarakat. Pentingnya kedudukan dan arti partai politik dalam demokrasi hingga banyak ilmuwan politik mengatakan tidak ada sistem politik berlangsung tanpa peran partai politik.

Tentu perkataan-perkataan di atas bukan untuk menjadikan partai politik besar kepala, ada tanggung jawab bawaan yang diembannya. Salah satunya fungsi dari partai politik itu sendiri, fungsi partai politik umumnya dibagi menjadi empat tetapi itu tidak akan penyusun bahas di bagian ini. Maksud penyusun, dengan

sebegitu pentingnya partai politik tentu akan menjadi bumerang jika partai politik tidak menjalankan fungsinya dengan baik terutama kaitannya dengan lingkungan hidup yang penyusun singgung di awal. Tanpa diawali kesadaran bahwa lingkungan hidup kita sudah rusak tentu sulit rasanya menjadikan partai politik instrumen penting untuk melakukan perbaikan lingkungan hidup. Bagaimana memaksimalkan partai politik dalam kaitan fungsinya untuk melahirkan kebijakan, program, kader yang mengkomunikasikan, dan rekrutmen politik yang peka terhadap lingkungan hidup.

Oleh karena itu, penulis tertarik ingin mengangkat tema ini yakni peran partai politik di Kota Semarang khususnya partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) dalam kaitan fungsinya terhadap lingkungan hidup. Penyusun ingin mengetahui sejauh mana fungsi partai politik Gerindra di Kota Semarang berjalan untuk perbaikan lingkungan hidup, juga sejauh mana komitmen nahkoda partai politik untuk tingkat lokal tersebut mendorong partainya untuk lebih peka terhadap lingkungan hidup, yang muaranya juga untuk kehidupan manusia itu sendiri.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyusun dan merumuskan beberapa permasalahan pokok yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana peran partai politik Gerindra dalam kaitan fungsi partai politik di Kota Semarang terhadap lingkungan hidup?
2. Bagaimana komitmen ketua partai politik Gerindra di Kota Semarang dalam membawa partainya untuk lebih peka terhadap lingkungan hidup?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasar rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran dalam kaitan fungsi partai politik Gerindra di Kota Semarang terhadap lingkungan hidup,
2. Untuk mengetahui komitmen ketua partai politik Gerindra di Kota Semarang dalam membawa partainya untuk lebih peka terhadap lingkungan hidup.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini secara teoritis merupakan tambahan asupan wawasan, khususnya dalam analisis peran fungsi partai politik di Kota Semarang terkait lingkungan hidup. Penelitian ini secara teoritis tambahan suatu konsep yang bisa menjadi bahan-bahan penelitian lebih lanjut khususnya dalam analisis peran fungsi partai politik terkait lingkungan hidup khususnya persoalan bagaimana fungsi partai politik dalam melihat persoalan lingkungan hidup dan komitmennya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

- a. Untuk Pembaca

Penelitian ini diinginkan menambah pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan pembaca. Melalui skripsi ini, pembaca dapat menambah wawasan serta dapat mengetahui bagaimana peran fungsi suatu partai politik dan tahu bagaimana lika-liku partai politik dalam menjalankan fungsinya. Juga, lebih mengetahui pendapat

ketua partai politik di suatu daerah tentang komitmen untuk membawa partainya lebih peka terhadap isu lingkungan hidup

b. Untuk Partai Politik

Penelitian ini diinginkan mampu memberi masukan atau gambaran untuk partai politik tentang bagaimana seharusnya isu lingkungan hidup menjadi salah satu isu krusial dalam menjalankan partai, sebab ke depan isu ini akan menjadi isu yang selalu ada dalam setiap perbincangan publik baik nasional maupun global.

c. Untuk Masyarakat

Penelitian ini diinginkan menambah pengetahuan masyarakat tentang apa itu fungsi partai politik, manfaat jika fungsi partai politik berjalan baik dan, menjadikan masyarakat lebih awas terhadap sedikit saja perubahan dari lingkungan hidupnya. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat membuat masyarakat bijak dalam menilai suatu kegiatan partai politik, mungkin partai politik tersebut sedang berusaha menjalankan terkait fungsinya di masyarakat.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Partai Politik

Menurut Miriam Budiardjo (2010) partai politik suatu kumpulan orang yang terorganisir yang orang di dalamnya memiliki tujuan, falsafah, dan mimpi yang sama dengan orientasi mengampu kekuasaan serta merebut kedudukan politik untuk melaksanakan mimpinya. Sigmund Neuwman dalam Budiardjo,

mendefinisikan partai politik ialah kumpulan orang dari pelaku-pelaku politik yang hidup dalam masyarakat, yang memfokuskan konsentrasinya guna pengendalian kekuasaan pemerintahan dan berkompetisi guna mendapat dukungan rakyat, dengan beberapa kumpulan lain yang memiliki tujuan yang berbeda-beda. Carl J. Fredrich (1950) partai politik adalah kumpulan manusia yang terorganisir secara kukuh untuk mempertahankan nahkoda pemerintahan bagi para pemimpinnya, dengan tujuan lebih lanjut memberikan kepada anggota partai melalui semacam kontrol ideal, keuntungan material, dan keuntungan-keuntungan lainnya. Giovanni Sartori masih dalam Budiardjo mendefinisikan partai politik kumpulan orang politik yang ikut pemilihan umum dan lewat itu menempatkan orang-orangnya untuk menduduki pemerintahan.

Ranney dan Kendal (1956) menjelaskan partai politik kumpulan orang yang punya tingkat mandiri tinggi untuk menempatkan orangnya dan ikut dalam pemilu agar mendapatkan dan memiliki kontrol atas birokrasi dan kebijakan publik. Anthony Downs (1957) partai politik adalah tim yang terdiri pria dan wanita yang berusaha mengendalikan aparatur pemerintahan dengan mendapatkan jabatan dalam pemilihan yang sah.

Ciri organisasi partai politik (La Palombara dan Weiner, 1966),

- Organisasi jangka panjang. Partai politik tidak tergantung pada pendirinya melainkan ada mekanisme suksesi,
- Formatur organisasi. Partai politik bisa berjalan fungsinya jika didukung oleh formatur organisasi, mulai lokal-nasional, dan ada alur interaksi yang

teratur di antara keduanya yang menjamin aliran informasi atas-bawah dan sebaliknya,

- Orientasi berkuasa. Partai politik ada guna mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan lokal dan nasional,
- Kekuatan publik ada sebagai instrumen penting untuk mendapatkan kekuasaan dan sebagai sumber legitimasi untuk berkuasa.

Peran utama partai politik (Dwight Y. King, 2003),

- Penghubung konstitusional antara masyarakat dan pemerintah,
- Meramu dan menelurkan program-program yang ditawarkan kepada masyarakat pemilih, untuk dijalankan pemerintahan terpilih,
- Saluran menjalankan kaderisasi dan memilih calon untuk menduduki jabatan politik.

1.5.2 Fungsi Partai Politik

Menurut Pamungkas (2011: 15) fungsi partai politik tidak selalu konstan, namun mengalami transformasi. Namun, bukan berarti tidak ada bentuk umum terkait apa fungsi partai politik itu sendiri. Beberapa ilmuwan politik sudah memetakan apa fungsi partai politik itu sendiri. Konsep V.O. Key tentang tiga elemen partai dalam Pamungkas:

- Partai di masyarakat pemilih,
- Partai sebuah kumpulan orang,

- Partai di lembaga publik.

Tiga bagian partai politik menurut Dalton dan Wattenberg,

1. Kumpulan orang aktif di partai,
2. Perwakilan orang partai di pemerintahan,
3. Partai di kalangan pemilihnya.

Semua itu saling terhubung satu sama lain. Partai sebagai organisasi berfungsi sebagai rekrutmen calon pemimpin politik dan mencari orang yang akan duduk di pemerintah, pendadaran ujung tombak partai politik, pelaksanaan kepentingan politik dan, pengagregasian kepentingan politik. Partai di pemerintahan berfungsi membuahakan/memperbanyak orang di pemerintahan, pengaturan pemerintahan, melaksanakan tujuan kebijakan, mengolah ketidaksetujuan dan lawan politik, memastikan tanggung jawab tindakan pemerintah, kontrol terhadap pengelolaan pemerintahan dan memperkuat pemerintahan dari kegoyahan. Sedangkan, partai di elektorat berfungsi meminimalkan pilihan bagi pemilih, mendidik warga negara, memberitahukan, dan merayu masyarakat untuk bersikap tertentu, membangkitkan kesetiaan serta mendorong masyarakat berpartisipasi.

Meny dan Knapp (1998) mengatakan fungsi partai politik sebagai sarana mendorong dan integrasi, ajang pembuatan pengaruh perilaku pemilih (*voting patterns*), ajang rekrutmen politik dan, ajang elaborasi pilihan-pilihan program. Sedangkan, Caton masih dalam Pamungkas (2011) berpendapat fungsi partai politik dalam negara demokrasi memiliki empat guna, artikulasi kepentingan:

mengelaborasi pembuatan program-program dan kebijakan pemerintah yg konsisten, agregasi kepentingan: mengambil aspirasi masyarakat dan mengemasnya, rekrutmen: memilih dan mendidik seseorang untuk tempat di eksekutif dan legislatif, mengawasi & mengontrol pemerintah. Empat inilah juga yang digunakan penyusun sebagai pisau analisis dalam menulis skripsi ini.

Fungsi partai politik dalam pihak pemerintah khususnya lanjut Caton, artikulasi yang telah disebutkan memiliki makna melaksanakan kebijakan, agregasi maknanya melanggengkan dukungan pada pemerintah, dan rekrutmen maknanya mengisi posisi-posisi di pemerintah. Sedangkan, dalam pihak oposisi artikulasi memiliki makna mengembangkan alternatif kebijakan, agregasi memperoleh dukungan untuk perubahan, rekrutmen membangun kumpulan orang-orang kompeten. Artikulasi, agregasi, dan rekrutmen adalah fungsi yang fundamental, partai bermain di proses politik secara berbeda ketika sebagai pemerintah atau oposisi. Fungsi ke empat, mengawasi dan mengontrol pemerintah tergantung pada sistem politik. Sistem parlementer fungsi ini hanya dilakukan oleh oposisi, sedangkan presidensial semua partai di legislatif menjalankan fungsi pengawasan (relasi eks-legislatif mutual independen, relasi *check and balances*).

Menurut Budiardjo (2010) fungsi partai politik di iklim demokrasi memiliki empat fungsi yakni, sebagai ajang saluran pertukaran informasi politik, ajang memasyarakatkan politik, ajang seleksi politik, dan ajang penengah perselisihan.

1.5.3 *Good Environmental Governance*

Menurut Siahaan (2004) asas-asas tata kelola negara yang baik dalam memakai lingkungan dengan prinsip keterusan yang baik disebut prinsip *Good Environmental Governance* (GEG). Menurut *World Bank* dalam Belbase (2010: 4):

“...it necessary to achieve the sustainable use of resources and the protection of environmental quality. This objective requires a transparent system of well-functioning environmental institutions, policies, and programs that actively involve the public in their formulation and implementation.”

Hal itu menggambarkan *Good Environmental Governance* sebuah asas nilai yang sangat penting guna keberhasilan pengelolaan sumber daya alam secara keterusan yang baik dan guna menjaga kualitas lingkungan. Tujuan asas nilai ini menginginkan transparansi pada ekosistem institusi, kebijakan yang mengikutsertakan masyarakat ketika merancang, dan mengimplementasikan kebijakan. Selain itu, Budiati (2012) mengatakan *Environmental Governance* sebagai kerangka kerja mengolah negara melalui interaksinya dengan masyarakat dalam kelola lingkungan hidup.

Asas nilai *Good Environmental Governance* menurut Belbase (2010):

1. Kejelasan hukum,
2. Pengikutsertaan,
3. Keterbukaan informasi,
4. Pertanggungjawaban,
5. Pelimpahan pengelolaan,
6. Badan yang konstitusional,

7. Kemudahan mendapat keadilan.

1.6 Operasionalisasi Konsep

Penyusun ingin mengetahui bagaimana fungsi partai politik berjalan dalam kaitan lingkungan hidup dan apakah fungsi yang dijalankan sudah memenuhi kriteria dari yang seharusnya fungsi partai politik itu (1) artikulasi kepentingan: mengelaborasi dan menegembangkan program-program dan menjalankan program pemerintah yang konsisten, (2) agregasi kepentingan: memilah tuntutan masyarakat dan mengemasnya, (3) rekrutmen: memilih dan mendidik orang untuk tempat di eksekutif dan legislatif, dan (4) mengawasi dan mengontrol pemerintah, semuanya dalam kaitan isu lingkungan hidup.

Bersama teori yang sudah dipaparkan di atas dan penggambaran kerangka berfikir, peneliti ingin mengetahui apakah fungsi partai politik sudah berjalan dan bagaimana kaitannya dengan lingkungan hidup. Juga, apakah ada kendala ataupun pendukung ketika berusaha menjalankan fungsinya.

1.7 Argumen Penelitian

Peran partai politik Gerindra dalam kaitan fungsinya sebagai partai politik di Kota Semarang terhadap lingkungan hidup cukup baik hal ini tercermin dari jawaban yang dikatakan oleh ketua Dewan Pimpinan Cabang partai Gerindra Kota Semarang ketika diajukan pertanyaan seputar fungsi partai politik yang dikaitkan dengan lingkungan hidup.

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian menurut Hasan (2002) merupakan tata cara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan. Pengertian lain dari metode penelitian menurut Arikunto (2006) ialah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya, seperti wawancara, observasi, tes, maupun dokumentasi. Sedangkan menurut Subagyo (2006: 2) metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan. Terakhir menurut Creswell (2017) metode penelitian merupakan rancangan dan cara terstruktur penelitian yang meliputi: dari asumsi-asumsi luas hingga metode-metode terperinci dalam pengumpulan, analisis, dan interpretasi data.

Dilihat dari jenisnya, menurut Creswell (2017) juga penelitian dibagi atas tiga macam, yaitu kuantitatif, kualitatif, dan metode campuran.

1.8.1 Tipe Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Creswell (2017: 5) penelitian metode kualitatif adalah cara mengeksplorasi dan memahami makna yang—oleh sejumlah individu atau sekelompok—dianggap berasal dari masalah masyarakat. Cara penelitian kualitatif ini mengikutsertakan sarana-sarana penting, seperti memberi pertanyaan-pertanyaan dan cara-cara, mengumpulkan data yang sesuai dari narasumber, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema yang umum, dan menjelaskan makna data. Laporan akhir untuk penelitian ini memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel. Siapa pun yang terlibat dalam bentuk penelitian ini harus menerapkan cara pandang penelitian yang bergaya

induktif, berfokus pada makna individual, menerjemahkan kompleksitas suatu persoalan.

1.8.2 Situs Penelitian

Penelitian ini dilakukan di partai politik Gerakan Indonesia Raya di Kota Semarang yang memiliki perolehan sebanyak enam kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang periode 2019 – 2024 dari total lima puluh kursi. Partai ini terhitung baru dan sejak awal berdiri perolehan kursi di DPRD Kota Semarang cukup baik dan stabil. Juga, di periode ini partai Gerindra dipihak pemerintah harapannya apa yang dipegang terejawantah pada program pemerintah.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Sebagaimana dijelaskan oleh Arikanto (2006: 145) subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Jadi, subjek penelitian itu merupakan sumber informasi atau sampel. Maka informan yang dipilih dalam penelitian ini:

1. Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra Kota Semarang Bapak
Joko Santoso, S.E., M.M.

1.8.4 Jenis Data

Jenis data yang digunakan berupa data kualitatif:

1. Wawancara
2. Dokumen-dokumen
3. Materi Audio-Visual

1.8.5 Sumber Data

Dalam setiap penelitian, selain menggunakan cara yang tepat juga dibutuhkan kemampuan memilah cara pengumpulan data yang berkait. Data adalah instrumen penting dalam penelitian. Berdasarkan masalah penelitian data yang digunakan untuk memecahkan masalah adalah:

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari data wawancara informan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Gerindra Kota Semarang Bapak Joko Santoso.

2. Data Sekunder

Data sekunder ialah data diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data Sekunder umumnya berbentuk data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia yang diperoleh dari otoritas atau pihak yang berwenang dan mempunyai efisiensi yang tinggi. Data sekunder penelitian ini diperoleh dari laman internet resmi partai politik atau laman lain yang dapat memberikan data yang relevan dengan penelitian.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang dipakai peneliti guna mendapat data dalam suatu penelitian. Penelitian kali ini, peneliti memilih jenis

penelitian kualitatif maka data yang diperoleh haruslah mendalam, jelas, dan spesifik. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data:

1. Teknik Wawancara (*interview*)

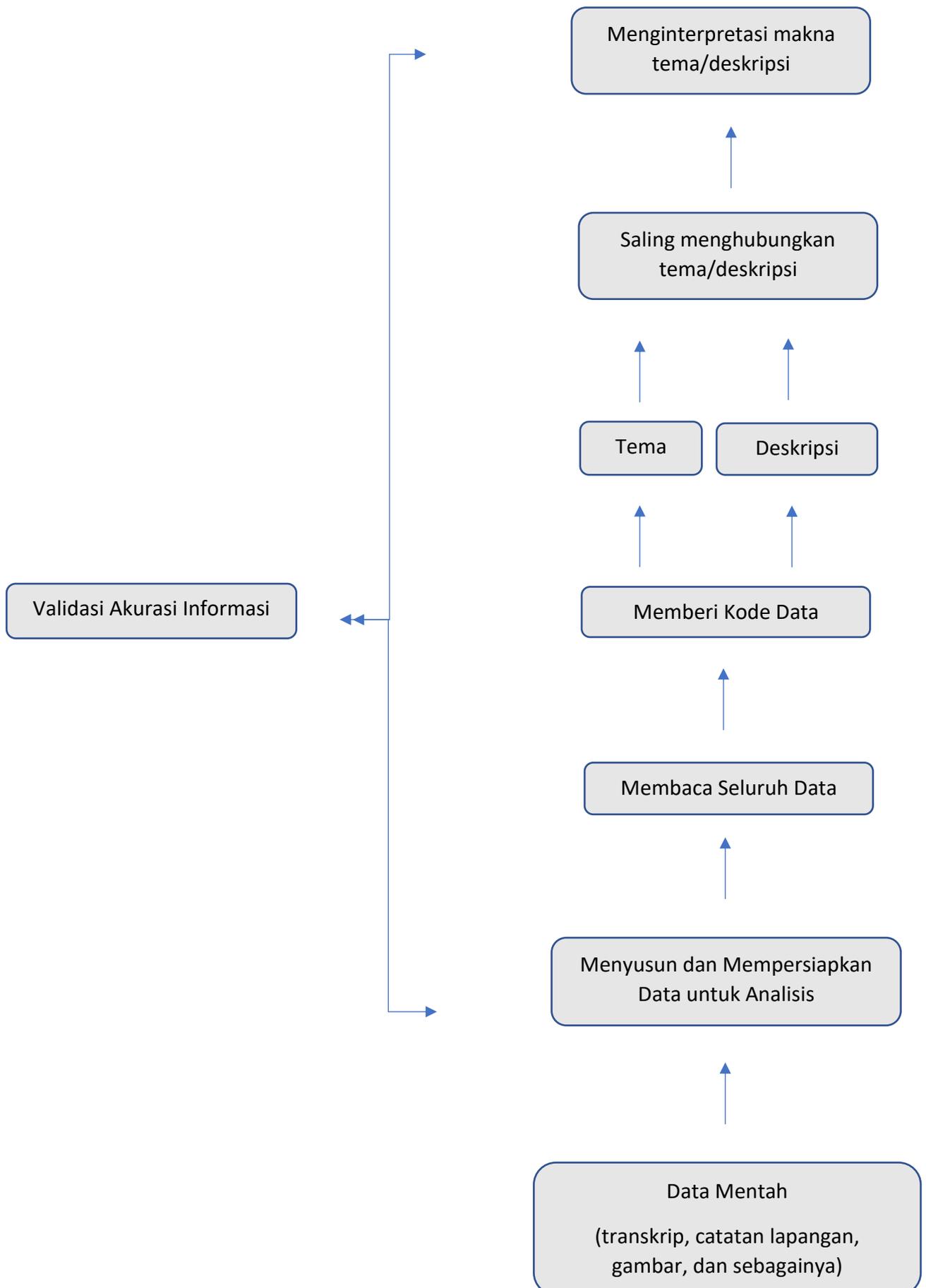
Wawancara adalah percakapan dengan tujuan tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban. Dalam penelitian ini menggunakan wawancara mendalam (*in depth interview*) dan terbuka yaitu metode wawancara dengan bertemu langsung dengan informan dan memberikan pertanyaan yang relevan dengan penelitian untuk mengumpulkan informasi yang kompleks. Melalui wawancara mendalam tersebut akan dapat mengemukakan segala hal yang berhubungan dengan persoalan dalam penelitian

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan cara mencari dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian. Dokumen-dokumen dalam penelitian ini bisa berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, arsip-arsip, media online, dan sebagainya yang mendukung untuk mendapatkan data.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Dalam rangka menjawab permasalahan penelitian maka analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan satu tahap yaitu kualitatif kemudian menghubungkan dengan teori yang digunakan dari hasil data kualitatif tersebut.



Gambar 1.1 Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif (Cresswell: 2017)

1.8.8 Kualitas Data

Dalam penelitian ini, peneliti tidak membandingkan data yang berupa hasil wawancara narasumber, sebab narasumber yang tersebut sudah sesuai dengan maksud penulisan ini. Jadi, hanya membandingkan dengan teori terkait fungsi partai politik.